

**IMPLEMENTASI PERSYARATAN PERUBAHAN DARI STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN**

(Studi Kasus di Kelurahan mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten
Boyolali Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri
Nomor 28 tahun 2006)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat Sarjana S-1

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Oleh:

SUWARNO

A 220100050

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp (0272) 717417 Fax 715448 Surakarta 57102

Surat Persetujuan Artikel Naskah Publikasi Ilmiah

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Dra. Sri Gunarsih, SH. MH.

NIK :202

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir mahasiswa:

Nama :Suwarno

NIM :A220100050

Program Studi :PPKn

Judul :IMPLEMENTASI PERSYARATAN PERUBAHAN DARI
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi Kasus di
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten
Boyolali Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 28
Tahun 2006)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya

Surakarta, 19 Mei 2014

Pembimbing

Dra. Hj. Sri Gunarsih, SH. MH.

NIK :202

IMPLEMENTASI PERSYARATAN PERUBAHAN DARI STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten
Boyolali Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 28 Tahun 2006)

Suwarno¹, Sri Gunarsih²

¹Mahasiswa Program Studi PPKn, ²Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan dari status desa menjadi kelurahan dan mendiskripsikan implementasi persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. syarat perubahan dari status desa menjadi kelurahan adalah luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk Jawa dan Bali, prasarana dan sarana memadai sebagai terselenggara pemerintahan kelurahan, potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan industri serta keanekaragaman mata pencaharian penduduk, kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri serta meningkatnya volume pelayanan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data interaktif yaitu dengan pengumpulan, reduksi, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan perubahan dari status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo dikarenakan wacana dari pemerintah daerah untuk pelebaran kota Boyolali dan banyak kantor pemerintah kabupaten di wilayah tersebut selanjutnya pemerintah desa bersama BPD menindak lanjuti wacana tersebut dengan mengajukan proposal usulan perubahan. Implementasi persyaratan perubahan status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 belum terlaksana dan tidak terpenuhi secara menyeluruh yaitu prasarana dan sarana belum memadai terselenggara pemerintahan kelurahan yaitu mengenai jaringan komunikasi dan fasilitas umum serta tidak ada peningkatan pelayanan.

Kata Kunci: *Persyaratan, Perubahan, Desa Menjadi Kelurahan.*

A. Pendahuluan

Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh pewarisan dari undang-undang lama yang pernah ada mengatur desa yaitu *inlandsche Gemeente Ordonantiem (IGO)* yang berlaku wilayah Jawa dan Madura. Wilayah luar Jawa dan Madura berlaku *inlandsche Gemeente Ordonantiem Buitengewesten (IGOB)*. Peraturan Perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan

kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh kearah kemajuan serta dinamis. Akhirnya dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 untuk mengarahkan dan menyeragamkan bentuk serta susunan pemerintahan desa dengan corak nasional untuk mewujudkan demokrasi pancasila. Selanjutnya mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah desa menegaskan bahwa desa merupakan daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten.

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana serta prasarana pemerintahan. Desa terdiri atas kepala dan perangkat yang terdiri dari kadus, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan sekretaris.

Perubahan status desa menjadi kelurahan daerah pemerintahan Kabupaten Boyolali dengan dikeluarkan peraturan daerah kabupaten Boyolali nomor 8 tahun 2012 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan. Perda tersebut merupakan landasan dalam mengubah status desa menjadi kelurahan di daerah Kabupaten Boyolali. Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di kelurahan Mojosongo ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Menurut Perda Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 pasal 2 ayat 1 dijelaskan desa mojosongo berubah status menjadi kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap suatu perubahan status desa menjadi kelurahan

disalah satu pemerintah daerah. Oleh karena itu dipandang penting untuk mengadakan penelitian tentang implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 serta dilaksanakan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006?

Tujuan penelitian merupakan titik pijak aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga dirumuskan secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mendiskripsikan implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006.

Penjelasan mengenai rumusan dan tujuan penelitian di atas peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi kepada pemerintah mengenai kebijakan implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah mengenai implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.

B. Kajian Teori

Menurut Nurcholis (2005:24) otonomi daerah merupakan hak yang diberikan kepada penduduk dalam suatu wilayah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan prinsip yang luas, memiliki kewenangan dalam kebijakan, nyata dan bertanggung jawab, berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin hubungan antar daerah serta menjaga keutuhan wilayah.

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ada dua unsur timbul yaitu penduduk dan wilayah. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, bahwa syarat-syarat pembentukan desa harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk, yaitu:
 - a) wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK.
 - b) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK.
 - c) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
- 2) luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- 3) wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- 4) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- 5) potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

- 6) batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- 7) sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Menurut Nurcholis (2005:134) bahwa, “kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan”. Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, bahwa desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Aspirasi masyarakat setempat paling sedikit $\frac{2}{3}$ penduduk desa yang memiliki hak pilih. Menurut pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008, perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) luas wilayah tidak berubah;
- 2) jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali;
- 3) prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- 4) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- 5) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- 6) meningkatnya volume pelayanan.

C. Metode Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak mulai bulan Maret sampai Mei 2014.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Afifuddin (2009:57), metode penelitian kualitatif adalah digunakan

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan bersifat induktif serta hasil menekankan makna generalisasi. Menurut Sugiyono (2013:8) bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu atau lebih tanpa membuat perbandingan.

Menurut Tohirin (2012:19-20), “Studi kasus adalah pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu”. Studi kasus yang akan digali dalam penelitian ini adalah implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Subjek penelitian disini adalah Lurah, Mantan BPD dan masyarakat setempat Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Objek penelitian ini antara lain:

1. Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
2. Implementasi persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari informan, tempat atau peristiwa dan dokumen. Sumber data tersebut untuk mengetahui tentang implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi secara tidak terstruktur yaitu fokus penelitian berkembang selama kegiatan berlangsung untuk mengamati di lapangan. Wawancara dalam penelitian ini adalah tidak terstruktur yaitu agar luwes, bebas dan dapat mendalam. Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai syarat perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo,

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Menurut Sugiyono (2012:274), triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dalam penelitian ini berasal dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012:274), triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu merupakan proses pengaturan dan mengkategorikan untuk medapat suatu kesimpulan. Menurut miles dan Huberman (1992:15) adalah pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai syarat perubahan dari status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Verifikasi/penarikan kesimpulan berdasarkan pertimbangan dari hasil penyajian data dan reduksi menyimpulkan implementasi persyaratan perubahan dari status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo. Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Perubahan dari Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan tersebut menjelaskan suatu desa berubah menjadi kelurahan atas prakarsa pemerintah bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Temuan dalam penelitian ini adalah perubahan status Desa

Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo diawali atas dasar wacana dari pemerintah daerah karena untuk pelebaran Kota Boyolali dan banyak Kantor Pemerintahan di wilayah Desa Mojosongo. Pemerintah bersama BPD dan masyarakat melakukan aspirasi serta mengajukan usulan perubahan setelah mendapat perintah dari pemerintahan kabupaten.

2. Implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali

Hasil penelitian menjelaskan bahwa luas wilayah Kelurahan Mojosongo tidak mengalami perubahan baik itu pada status Desa Mojosongo maupun sampai sekarang. Bahwa luas wilayah Kelurahan Mojosongo 365, 889 Ha tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kelurahan Mojosongo bahwa jumlah penduduk pada Tahun 2011 dan 2012 lebih dari 4500 jiwa atau 900 KK. Kelurahan Mojosongo Kabupaten Boyolali merupakan termasuk wilayah Jawa yaitu berada di Jawa Tengah.

Peneliti menemukan Prasarana dan sarana Desa Mojosongo jaringan komunikasi tidak ada seperti telepon dan internet, gedung tidak memadai sebagai kantor kelurahan dikarenakan kondisi sudah tidak bagus dan tempatnya tidak strategis serta fasilitas umum tidak memadai seperti komputer, laptop, printer dan alat-alat kantor yang mendukung. Kelurahan Mojosongo terdapat jasa pengangkutan, ekspedisi dan pengiriman, ketrampilan, hukum dan konsultan serta penginapan atau perhotelan. Mengenai industri yaitu adanya industri beton dan plastik serta mebel. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Mojosongo bermacam-macam yaitu petani, buruh tani, PNS, pedagang keliling, peternak, montir, dokter swasta, bidan swasta, perawat swasta, pembantu, TNI, POLRI, pengusaha, pengacara, notaris, dukun terlatih, arsitek dan karyawan swasta. Keanekaragaman status penduduk Kelurahan Mojosongo yaitu adanya berbagai etnis antara jawa, dayak, sunda, batak, madura, melayu dan bali serta perbedaan jenis mata pencaharian masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 bahwa syarat perubahan status desa menjadi kelurahan luas wilayah tidak berubah. Luas

wilayah tidak berubah, jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai terselenggaranya pemerintahan kelurahan (menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 5 ayat (4) bahwa prasarana dan sarana memadai pemerintah kelurahan adalah memiliki kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan terpenuhi fasilitas umum), potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian, kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri serta meningkatnya volume pelayanan.

Desa Mojosongo pada waktu itu tidak ada peningkatan yaitu dengan tidak tepat waktu kerja perangkatnya, kurang transparan, tidak ada dorongan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak ada aktif. Pelayanan setelah perubahan menjadi kelurahan dari segi ketepatan waktu sudah ada perubahan yaitu kedisiplinan jam kerja lurah dan perangkat, keterbukaan atau transparansi dalam pelayanan administrasi, penggalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan cepat menyesuaikan terhadap perkembangan daerah. Menurut Sinambela (2008:6) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keamanan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan dari status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo dikarenakan atas dasar wacana dari pemerintah daerah untuk pelebaran kota Boyolali dan banyak kantor pemerintahan kabupaten di wilayah tersebut selanjutnya pemerintah desa bersama BPD menindaklanjuti wacana tersebut

dengan mengajukan proposal usulan perubahan status Desa Mojongo menjadi Kelurahan Mojosongo.

2. Implementasi persyaratan perubahan status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 belum terlaksana dan tidak terpenuhi secara menyeluruh yaitu prasarana dan sarana belum memadai terselenggara pemerintahan kelurahan yaitu mengenai jaringan komunikasi dan fasilitas umum serta tidak ada peningkatan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, handa. 2012. Petunjuk menggunakan peneliti hukum. (<http://-penelitihukum.org/tag/pengertian-persyaratan/>). Diunduh Rabu, 12 Maret 2014, Pukul 05.51 WIB.
- Afifuddin, dan Saebeni, Ahmad Beni. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Darsinah dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mehammadiyah Surakarta*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2013. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokus Media.
- Husanah, Neni Nurmayanti. 2012. pengertian perubahan menurut para ahli. (<http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-perubahan-menurut-beberapa-.html>). Diunduh Rabu, 12 Maret 2014, Pukul 05.51 WIB.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Malengsang, Romel Krismanto. 2013. *Proses Alih Status Desa menjadi Kelurahan (suatu Studi di Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan)*. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1458>). Di unduh pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisi Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UI-Pres.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pemerintah Desa Mojosongo. 2011. *Proposal Usulan Perubahan Status Desa Mojosongo Menjadi Kelurahan Mojosongo*. Desa Mojosongo.
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali. (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boyolalikab.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FKELURAHAN.pdf&ei=JvRsU7HwAcSjrQeN8YC4Cg&usg=AFQjCNFBgsDE2CDAGhOAiORNf7aybuywoQ&bvm=bv.66330100,d.bmk>). Diakses pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014, pukul 10.30 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. (http://www.boyolalikab.go.id/sites/default/files/no_6.pdf). Diakses pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, pukul 12.45 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boyolalikab.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fno_8.pdf&ei=2AJtU_7DIuMrgeT2YC4Aw&usg=AFQjCNHBeABbag6MajrOTosEH8CoL56SDg&bvm=bv.66330100,d.bmk). Diakses pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014, pukul 10.35 WIB.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sihombing. 1991. *Pintar Politikus Dunia*. Pratasa Publisher.

Sinambela, Poltak Lijan, 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bandung: Bumi Aksara.

Situs Resmi Kelurahan Mojosongo. *Profil, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Pelayanan, Agenda, Peta, Monografi, TP-PKK, LPM, KPMK, LINMAS, Pertanian, Peternak dan Home Industri*. (<http://www.mojosongokel.com/>). Diakses pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, pukul 12.40 WIB.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suher. 2011. *Analisis Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Dalam Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Desa Curug Kota Serang*. (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffreitory.fisipuntirta.ac.id%2F105%2F1%2FSKRIPSI%2FSuher.pdf&ei=jdqzUtKbLcq4kQe8qIF4&usg=AFQjCNHq2eNyUuyupGIAeOIA5wlBSvrJCQ&bvm=bv.58187178,d.eW0>). Diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, pukul 10.30 WIB.

Surakmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan. (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bpkp.go.id%2Fuu%2Ffiledownload%2F%2F26%2F105.bpkp&ei=gNtU5blOM3rAf4_oB4&usg=AFQjCNHpVQckMfgsJIH2jiPcLqMNuWwSuw&bvm=bv.66330100,d.bmk). Diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2014, pukul 11.10 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQFjAA&url=http%3A%2F%2Fflkbh.uny.ac.id%2Fsites%2Fflkbh.uny.ac.id%2Ffiles%2FUU_NO_6_2014.PDF&ei=iQRtU6vwPMeNrQeQ8IHwDQ&usg=AFQjCNFYFcdXpMFbxdDpA7pHlohqEpwQ&bvm=bv.66330100,d.bmk). Diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014, pukul 11.15 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&qesrcs&>

[source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kpu.go.id%2Fdmdocuments%2FUU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf&ei=AUYgU99NMqXrAeRuYDoDw&usg=AFQjCNFOZXX0PXFAcFOcIp0bWjCJiJeQ&bvm=bv.62788935,d.bmk](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/FUU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf&ei=AUYgU99NMqXrAeRuYDoDw&usg=AFQjCNFOZXX0PXFAcFOcIp0bWjCJiJeQ&bvm=bv.62788935,d.bmk)). Diunduh pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, Pukul 14.25 WIB.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.